

SEJARAH KEDATUKAN URUNG SUKA PIRING TAHUN 1823-1946

M. Ade Syahputra Simbolon¹, Abdi Mubarak Syam²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2}

m.adesyahputra02@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejarah kedatukan urung suka piring di Sumatera Timur tahun 1823-1946, dengan fokus pada dinamika politik, sosial, dan ekonomi dalam konteks transformasi kolonial dan lokal. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan empat tahap utama yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedatukan Urung Suka Piring berperan penting dalam suksesi Kesultanan Deli dan adaptasi terhadap perubahan sosial ekonomi akibat migrasi dan modernisasi. Selain itu, kawasan strategis seperti Kota Maksum, Kesawan, dan Polonia di wilayah Kedatukan Sukapiring mencerminkan perkembangan penting dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik pada masa kolonial. Penelitian ini menegaskan pentingnya Kedatukan Urung Suka Piring dalam sejarah Sumatera Timur dan memberikan perspektif komprehensif tentang transisi dari sistem tradisional ke era modern di Indonesia. Simpulan penelitian ini mengungkap bahwa Kesawan, Polonia, dan Maksum di Medan memiliki kontribusi signifikan terhadap sejarah sosial, ekonomi, dan politik di Timor-Leste, khususnya dalam konteks Urung Suka Piring. Kesawan bertransformasi menjadi pusat bisnis modern, sementara Polonia menjadi kota penting dalam sejarah wilayah tersebut. Maksum, kota besar, memengaruhi struktur sosial wilayah tersebut karena pengaruh kolonial dan migrasi.

Kata Kunci: Kedatukan Urung Suka Piring, Sejarah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the history of the Urung Suka Piring kingdom in East Sumatra in 1823-1946, with a focus on political, social, and economic dynamics in the context of colonial and local transformation. This study uses a historical method with four main stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the Urung Suka Piring kingdom played an important role in the succession of the Deli Sultanate and adaptation to socio-economic changes due to migration and modernization. In addition, strategic areas such as Kota Maksum, Kesawan, and Polonia in the Sukapiring kingdom area reflect important developments in the social, economic, and political contexts during the colonial period. This study confirms the importance of the Urung Suka Piring kingdom in the history of East Sumatra and provides a comprehensive perspective on the transition from the traditional system to the modern era in Indonesia. The conclusion of this study reveals that Kesawan, Polonia, and Maksum in Medan have significant contributions to the social, economic, and political history of Timor-Leste, especially in the context of Urung Suka Piring. Kesawan transformed into a modern business center, while Polonia became an important city in the history of the region. Maksum, a large city, influenced the social structure of the region due to colonial influences and migration.

Keywords: History, The King of Urung Suka Piring.

PENDAHULUAN

Sumatera Timur merupakan wilayah bekas keresidenan pada masa kolonial Belanda yang terletak di bagian timur Pulau Sumatera. Wilayah ini mencakup daerah-daerah yang kini menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan sebagian Aceh, dengan Medan sebagai ibukotanya. Menurut Tengku Luckman Sinar dalam bukunya *"Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur"*, daerah ini meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, dan Labuhan Batu (Sinar, 2006).

Karl J. Pelzer, dalam bukunya yang berjudul *"Tuan Kebun dan Petani"*, menjelaskan bahwa Sumatera Timur terdiridari dataran pantai dan kaki bukit bagian timur dataran tinggi Batak, membentang dari perbatasan Aceh di utara hingga Sungai Rokan di selatan (Pelzer, 1985). Wilayah ini memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama karena perkembangan perkebunan-perkebunan besar pada masa kolonial yang mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi daerah tersebut hingga saat ini.

Sejarah Sumatera Timur menyimpan banyak kisah menarik tentang berbagai kedatukandan kerajaan yang pernah berjaya di wilayah tersebut. Salah satu entitas politik yang memiliki peran penting dalam dinamika sosial-politik di Sumatera Timur adalah Kedatukan Urung Suka Piring. Kedatukan ini memiliki sejarah yang panjang, namun periode tahun 1823-1946 menjadifokus utama dalam kajian ini karena merupakan masa yang penuh dengan perubahan signifikan, baik dalam struktur internal kedatukan maupun pengaruh eksternal yang mempengaruhi eksistensinya. Kedatukan Urung Suka Piring merupakan salah satu dari empat kedatukan utama yang membentuk

struktur politik tradisional di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Kesultanan Deli (Anderson, 1823). Keberadaan kedatukan ini dapat dilacak jauh sebelum tahun 1823, namun periode awal abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 menjadi masa yang krusial dalam perkembangan dan transformasinya.

Tahun 1823 menjadi titik awal kajian ini karena bertepatan dengan mulai meningkatnya pengaruh kolonial Belanda di wilayah Sumatera Timur (Reid, 2005). Kehadiran kekuatan asing ini membawa perubahan signifikan dalam struktur politik dan ekonomi lokal, termasuk di Kedatukan Urung Suka Piring. Selama lebih dari satu abad berikutnya, kedatukan ini mengalami berbagai dinamika, mulai dari adaptasi terhadap sistem administrasi kolonial hingga pergolakan internal dalam menghadapi modernisasi. Periode ini juga ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat, terutama setelah dibukanya perkebunan-perkebunan besardi wilayah Sumatera Timur pada paruh kedua abad ke-19 (Pelzer, 1985).

Hal ini membawa dampak besar terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat Urung Suka Piring, yang harusberadaptasi dengan perubahan pola agraria dan masuknya pendatang dari berbagai daerah. Akhir dari periode kajian ini, yaitu tahun 1946, dipilih karena bertepatan dengan berakhirnya era kolonial dan dimulainya fase baru dalam sejarah Indonesia sebagai negara merdeka (Armani, 2020).

Perubahan status politik ini tentunya membawa implikasi besar terhadap eksistensi kedatukan-kedatukan tradisional, termasuk Urung Suka Piring, yang harus menegosiasikan posisinya dalam struktur negara modern. Dengan latar belakang ini, kajian tentang Sejarah Kedatukan Urung Suka Piring Tahun 1823-1946 di Sumatera Timur

menjadi penting untuk memahami dinamika politik, sosial, dan ekonomi di wilayah tersebut, serta memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang transisi dari sistem politik tradisional menuju era modern di Indonesia.

Kajian mengenai sejarah Sumatera Timur, khususnya terkait struktur politik lokal dan dinamika sosial-ekonomi, telah menarik perhatian banyak peneliti. Namun, studi yang secara spesifik membahas Kedatukan Urung Suka Piring masih terbatas. Anthony Reid dalam karyanya memberikan gambaran luas tentang dinamika politik dan sosial di Sumatera pada periode kolonial (Reid, 2005), sementara Tengku Luckman Sinar menyajikan narasi komprehensif tentang sejarah kerajaan-kerajaan Melayu di wilayah tersebut (Sinar, 2006). Karl J. Pelzer fokus pada perkembangan ekonomi perkebunan yang sangat mempengaruhi dinamika sosial-politik di wilayah ini (Pelzer, 1985). Perret menganalisis pembentukan lanskapetnis di Sumatera Timur (Perret, 2012), sementara Andaya menyediakan perspektif regional yang lebih luas (Andaya, 2008).

Penelitian yang lebih spesifik dan relevan dengan kajian tentang kedatukan di Sumatera Timur dilakukan oleh Nur'Aini, yang membahas sejarah Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Hampan Perak. Studi ini mengungkapkan proses pembentukan kedatukan melalui migrasi orang Karo dan interaksi mereka dengan masyarakat Melayu setempat (Aini, 2021). Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Agam Husein Wibowo, Irwansyah & Muhammad Faishal tentang Kedatukan Sunggal Serbanyaman memberikan perspektif berharga tentang signifikansi historis kedatukan dalam konteks Kesultanan Deli. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Kedatukan

Sunggal Serbanyaman, yang didirikan pada tahun 1629, memainkan peran penting dalam sejarah Sumatera Utara. Studi ini juga menyoroti perlawanan kedatukan terhadap kolonialisme Belanda melalui Perang Sunggal (1872-1895), serta dampak Revolusi Sosial Sumatera Timur 1946 terhadap eksistensi dan warisan kedatukan (Wibowo, 2024). Temuan ini memberikan konteks yang relevan untuk memahami dinamika politik dan sosial yang mungkin juga dialami oleh Kedatukan Urung Suka Piring.

Hasil penelitian dari karya-karya tersebut secara umum menunjukkan bahwa periode 1823-1946 di Sumatera Timur ditandai dengan perubahan signifikan dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial akibat pengaruh kolonial, perkembangan ekonomi perkebunan, dan gejolak sosial-politik. Terjadi transformasi dalam sistem pemerintahan tradisional, pergeseran pola ekonomi, dan perubahan komposisi demografi akibat migrasi. Persamaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus geografis di wilayah Sumatera Timur dan periode waktu yang sebagian besar mencakup era kolonial hingga awal kemerdekaan. Selain itu, terdapat kesamaan dalam pendekatan yang mengintegrasikan aspek politik, ekonomi, dan sosial dalam analisis sejarah. Khususnya, penelitian tentang Kedatukan Sunggal Serbanyaman memberikan model analisis yang relevan untuk memahami peran dan signifikansi kedatukan dalam konteks yang lebih luas.

Perbedaan utama terletak pada fokus spesifik penelitian penulis pada Kedatukan Urung Suka Piring. Sementara karya-karya sebelumnya memberikan gambaran luas atau berfokus pada entitas politik lain, penelitian ini mengambil pendekatan

mikro-historis dengan mendalami dinamika internal dan eksternal dari satu kedatukan spesifik. Penelitian penulis juga berupaya menggunakan sumber-sumber primer yang mungkin belum banyak dieksplorasi, termasuk tradisi lisan dan arsip lokal, untuk memberikan perspektif baru dalam historiografi Sumatera Timur.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam literatur dengan menyajikan analisis longitudinal yang komprehensif tentang evolusi Kedatukan Urung Suka Piring dari tahun 1823 hingga 1946, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana entitas politik lokal ini beradaptasi, bertahan, dan bertransformasi menghadapi berbagai perubahan historis yang signifikan. Hasil penelitian dari karya-karya tersebut secara umum menunjukkan bahwa periode 1823-1946 di Sumatera Timur ditandai dengan perubahan signifikan dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial akibat pengaruh kolonial dan perkembangan ekonomi perkebunan. Terjadi transformasi dalam sistem pemerintahan tradisional, pergeseran pola ekonomi, dan perubahan komposisi demografi akibat migrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi pustaka. Metode sejarah yang diterapkan mengikuti empat tahap utama sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowijoyo: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik melibatkan pengumpulan sumber-sumber tertulis yang relevan, terutama sumber primer seperti arsip kolonial Belanda, laporan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan Kedatukan Urung Suka

Piring. Sumber sekunder berupa buku-buku sejarah, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu tentang Sumatera Timur dan sistem kedatukan juga dimanfaatkan secara ekstensif. Mengingat keterbatasan akses terhadap sumber lisan, penelitian ini lebih mengandalkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber dokumenter.

Pada tahap verifikasi, dilakukan kritik eksternal untuk menguji otentisitas dokumen dan kritik internal untuk menilai kredibilitas informasi yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut. Interpretasi data dilakukan dengan menggunakan pendekatan diakronik dan sinkronik sebagaimana dianjurkan oleh Kartodirdjo, untuk memahami perkembangan Kedatukan Urung Suka Piring dalam konteks temporal dan spasial. Analisis juga diperkaya dengan pendekatan interdisipliner, memanfaatkan konsep-konsep dari antropologi dan sosiologi untuk memperdalam pemahaman tentang struktur sosial dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat Melayu Sumatera Timur.

Historiografi sebagai tahap akhir dilakukan dengan menyusun narasi sejarah secara kronologis dan tematis, menekankan pada aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang mempengaruhi perkembangan Kedatukan Urung Suka Piring selama periode 1823-1946. Penulisan sejarah ini tidak hanya bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu, tetapi juga untuk menganalisis proses perubahan dan kontinuitas dalam struktur kekuasaan lokal di tengah dinamika kolonialisme dan perubahan sosial di Sumatera Timur (Irwanto, 2014). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang sejarah lokal dan peran kedatukan dalam lanskap politik

Sumatera Timur pada masa kolonial hingga awal kemerdekaan Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini berhasil mengungkap berbagai aspek sejarah Kedatukan Urung Suka Piring di Sumatera Timur selama periode 1823-1946, mencakup dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang berkontribusi pada perubahan struktur kekuasaan lokal dalam konteks kolonial dan modernisasi. Beberapa temuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Struktur dan Peran Kedatukan Urung Suka Piring

Kedatukan Urung Suka Piring merupakan salah satu entitas politik penting dalam struktur Raja Berempat Kesultanan Deli. Sebagai bagian dari lembaga tradisional ini, Kedatukan Urung Suka Piring memiliki legitimasi yang diakui secara luas, terutama dalam proses pengambilan keputusan politik dan suksesi kepemimpinan di Kesultanan Deli. Penelitian menemukan bahwa kedatukan ini memainkan peran signifikan dalam mengelola hubungan antara komunitas pesisir dan dataran tinggi melalui jaringan genealogis dan budaya yang kuat dengan etnis Karo.

Pengaruh Kolonialisme terhadap Struktur Lokal

Periode 1823 ditandai dengan meningkatnya kehadiran kolonial Belanda di Sumatera Timur, yang membawa dampak besar terhadap struktur politik dan ekonomi Kedatukan Urung Suka Piring. Pengaruh kolonial tidak hanya terlihat dalam pengaturan sistem administrasi lokal tetapi juga dalam pengembangan ekonomi melalui perkebunan besar di wilayah tersebut. Temuan menunjukkan bahwa kolonialisme mendorong transformasi dari sistem agraria tradisional menjadi

sistem ekonomi berbasis kapitalisme yang memengaruhi kehidupan masyarakat lokal.

Dinamika Sosial dan Ekonomi di Kawasan Strategis Kota Maksom

Kawasan Kota Maksom berfungsi sebagai pemukiman elit bangsawan Melayu dan tokoh agama di Kesultanan Deli. Lokasinya yang strategis di pusat kota mencerminkan peran penting kawasan ini dalam politik lokal. Namun, migrasi dan urbanisasi yang dipicu oleh kebijakan kolonial menyebabkan perubahan demografi, yang menggeser karakter sosial kawasan ini.

Kesawan

Kesawan awalnya merupakan pusat perdagangan tradisional dan berkembang menjadi kawasan bisnis modern selama masa kolonial. Bangunan-bangunan bersejarah di kawasan ini menjadi saksi perjalanan ekonomi lokal dari aktivitas berbasis komoditas lokal hingga integrasi dengan pasar global.

Polonia

Kawasan ini berkembang dari lahan rawa menjadi pusat transportasi udara Sumatera Timur. Penelitian ini mencatat pentingnya Polonia dalam mendukung perkembangan infrastruktur kolonial yang berdampak langsung pada konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Dampak Perubahan Politik dan Revolusi Sosial

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa tahun 1946 menjadi periode transisi penting bagi Kedatukan Urung Suka Piring, terutama akibat Revolusi Sosial di Sumatera Timur. Peristiwa ini menantang posisi tradisional kedatukan dalam struktur kekuasaan, memaksa

adaptasi terhadap dinamika negara modern yang sedang terbentuk. Adaptasi dan Keberlanjutan Penelitian juga menemukan bahwa meskipun menghadapi tekanan dari kolonialisme, migrasi, dan modernisasi, Kedatukan Urung Suka Piring menunjukkan kemampuan adaptasi yang signifikan. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka menjaga peran politik dan sosial dalam struktur Kesultanan Deli sambil menegosiasikan eksistensi mereka dalam sistem baru yang diatur oleh pemerintah kolonial dan kemudian pemerintahan Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

Sejarah Urung Suka Piring

Urung Suka Piring merupakan salah satu dari empat Raja Urung yang membentuk lembaga Raja Berempat di pesisir Sumatera Timur. Lembaga ini telah ada sebelum masuknya pengaruh Kesultanan Aceh ke wilayah tersebut, menunjukkan bahwa struktur kekuasaan lokal ini memiliki akar yang cukup tua dalam sejarah Sumatera Timur. Kedatukan Urung Suka Piring didirikan oleh seorang yang bermarga Karo-karo (Husny, 1978). Fakta ini menjelaskan adanya hubungan yang erat antara Urung Suka Piring dengan kelompok etnis Karo di dataran tinggi. Keterkaitan ini menegaskan kuatnya ikatan genealogis dan kultural antara masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan, yang terbentuk melalui proses migrasi dari dataran tinggi Karo ke wilayah pesisir Sumatera Timur. Keberadaan pendiri yang berasal dari marga Karo-karo ini menjadi bukti penting tentang asal-usul dan latar belakang etnis dari Kedatukan Urung Suka Piring, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antar kelompok etnis di wilayah Sumatera Timur (Meuraxa, 1973).

Wilayah kekuasaan Urung Suka Piring meliputi daerah Kampung Baru dan sekitar Medan Kota. Lokasi strategis ini kemungkinan besar memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi dan politik Urung Suka Piring, mengingat posisinya yang dekat dengan pusat perdagangan dan pemerintahan di masa kolonial. Sebagai bagian dari Raja Berempat, Urung Suka Piring memiliki peran signifikan dalam dinamika politik lokal, termasuk dalam proses suksesi kepemimpinan di Kesultanan Deli dan Serdang. Meskipun Datuk Sunggal yang berperan sebagai Ulun Janji (pembawa kata putus), posisi Urung Suka Piring dalam struktur ini menunjukkan bahwa mereka memiliki suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan politik di tingkat regional (Takari, 2010).

Keberadaan Urung Suka Piring sebagai bagian dari sistem Raja Berempat menunjukkan bahwa mereka memiliki legitimasi tradisional yang kuat dan diakui oleh entitas politik lainnya di wilayah tersebut. Penting untuk dicatat bahwa sejarah Urung Suka Piring tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih luas, yaitu dinamika politik, ekonomi, dan sosial di Sumatera Timur selama periode pra-kolonial hingga awal kemerdekaan Indonesia. Peran mereka dalam struktur kekuasaan lokal dan interaksi dengan kekuatan eksternal seperti Kesultanan Aceh dan pemerintah kolonial Belanda tentunya mempengaruhi perkembangan dan transformasi Urung Suka Piring selama periode tersebut (Perret, 2012).

Wilayah Kedatukan Urung Suka Piring

Kota Maksu (Wilayah Kedatukan Sukapiring)

Membicarakan Kota Maksu tidak dapat terlepas dari pengaruh kolonial Belanda. Hal ini dikarenakan terbentuknya hubungan Sultan dan

pemerintah kolonial melahirkan sebuah kesepakatan yang diatur dalam politik kontrak sehingga tampaklah adanya campur tangan Belanda dalam kebijakan Sultan. Husny menyatakan bahwa Kota Maksu artinya daerah yang terpelihara. Banyak yang beranggapan asal mula penamaan "Maksu" diambil dari nama Mufti Kerajaan Deli atau ulama besar Syekh Hassan Maksu yang dulu pernah tinggal di kawasan ini, tepatnya di Jalan Puri (Husny, 1978). Meuraxa menjelaskan bahwa yang disebut Kota Maksu adalah Jalan Puri yang sekarang (Meuraxa, 1973).

Di zaman Belanda, ada seorang Syekh Imam Masjid Raya Sultan Deli yang bernama Tuan Syekh Hassan Maksu. Syekh itu memiliki pengaruh besar dalam lingkungan agama Islam di sekitar Kota Medan. Apakah karena itu sekitar tempat Syekh itu tinggal disebut Kota Maksu? Tidak pasti mengapa kawasan tersebut diberi nama Maksu yang kebetulan sama dengan nama seorang ulama besar Kesultanan Deli. Namun yang pasti, arti "terpelihara" untuk daerah ini merupakan suatu gambaran bahwa kawasan Kota Maksu adalah suatu pemukiman yang suci, di dalamnya tinggal orang-orang penting dalam Kesultanan. Tidak dibenarkan orang asing maupun Timur Jauh untuk tinggal maupun berjualan di situ. Menurut Usman Pelly (2016), Kota Maksu adalah daerah suci yang diperuntukkan sebagai kawasan tinggal para bangsawan. Jalan Antara merupakan batas antara kampung sultan dengan kawasan orang Tionghoa yang dilarang melintasi Kota Maksu (Pelly, 2022).

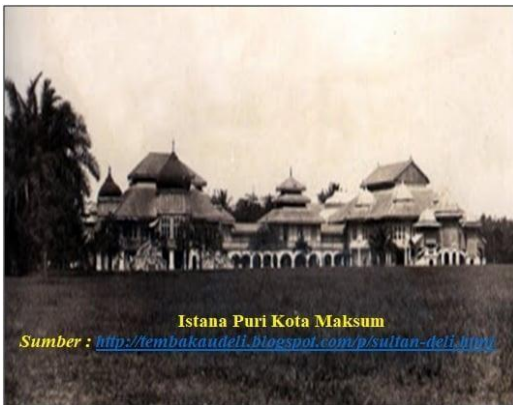
Dari salah satu potongan Koran Sinar Deli tertanggal 7 September 1932, disebutkan bahwa polisi kerajaan berjaga-jaga di jalan-jalan masuk Kota Maksu untuk menghindari masuknya orang Tionghoa untuk berjualan di

dalamnya. Bahkan sampai saat ini, beberapa orang Melayu yang punya kecenderungan menjual tanahnya di Kota Maksu tidak membiarkan orang luar membeli tanah mereka. Hal ini yang menjadi penyebab mayoritas masyarakat kini kebanyakan adalah suku Minangkabau yang memanfaatkan kawasan Kota Maksu sebagai area tinggal karena alasan dekat dengan pusat-pusat pasar. Pada tahun 1909, hampir seluruh penduduk Kota Maksu merupakan masyarakat Melayu. Kedatangan para imigran kemudian membuat Kota Maksu dihuni oleh beberapa etnis.

Sebelum kemerdekaan (1945), masyarakat Kota Maksu terdiri dari etnis Melayu, Mandailing, Minangkabau, dan Jawa. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan informasi bahwa orang-orang Mandailing banyak menjadi ulama-ulama atau guru agama. Mereka yang lulus dari madrasah dipekerjakan oleh Sultan Deli sebagai Kadhi dan Imam serta jabatan-jabatan lain dalam pengadilan agama sehingga diberikan tanah dan rumah di Kota Maksu, Sungai Mati, Kampung Masjid, dan Gelugur. Hingga saat ini daerah Sungai Mati masih menjadi kawasan pemukiman etnis Mandailing. Dari peta-peta buatan Belanda tahun 1915 dan 1933, kawasan ini diberi nama "Kota Ma'soem" (Barus, 2021).

Saat ini, Kota Maksu lebih dikenal dengan nama Kota Matsum dan kawasannya telah dibagi menjadi empat bagian. Tidak ada yang tahu pasti mengapa sebutannya berubah. Matsum tidak memiliki arti, oleh karena itu sepertinya nama tersebut berubah karena kesalahan pengucapan saja. Menurut Pelly, selama pendudukan militer Belanda di Negara Sumatera Timur dari 1947-1950, Kota Maksu dibagi menjadi dua kampung, Kota Maksu I

dan KotaMaksum II. Pada tahun 1959, Kota Maksum II dibagi menjadi dua kampung, yaitu Kota Maksum II dan Kota Maksum III. Selanjutnya Kota Maksum II kembali dibagi menjadi dua yaitu Kota Maksum III dan Kota Maksum IV (Pelly, 2022).



Gambar 1. Istana Puri Kota Medan
(Sumber: Buku Raja-Raja di Sumatera Timur)

Kawasan Kesawan-Kota Medan (Wilayah Kedudukan Sukapiring)

Kawasan Kesawan di Kota Medan, yang kini menjadi pusat bisnis yang ramai, menyimpan banyak bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu pertumbuhan awal kota ini. Berlokasi di Jalan Hindu, bangunan-bangunan ini sebagian besar merupakan toko dan kantor peninggalan era kolonial Belanda. Sayangnya, banyak dari bangunan bersejarah ini sekarang berada dalam kondisi yang memprihatinkan, tidak terawat, dan mulai rusak. Secara historis, kawasan Kesawan adalah bagian penting dari perkembangan awal Kota Medan. Asal usul nama "Kesawan" memiliki akar sejarah yang dalam. Menurut sejarawan Drs. H. Muhammad Tok Wan Haria, nama "Kesawan" berasal dari bahasa Karo, dari kata "*kesawahen*," yang berarti "kampung." Kata ini juga bisa merujuk pada sebuah halaman atau lapangan besar yang digunakan untuk pertemuan, menyabung ayam, lomba lari, rapat, dan berburu. Sejarawan lain,

Tuanku Luckman Sinar Basarshah-II SH, memiliki pandangan serupa, meskipun dengan makna yang berbeda, mengaitkan "*kesawahen*" dengan arti "ke sawah." Seiring waktu, istilah ini mengalami perubahan artikulasi hingga akhirnya menjadi "Kesawan" (Basarshah, 2006).

Luckman juga mencatat bahwa Kesawan dibuka pada masa Masannah, cicit dari Guru Patimpus, yang merupakan Datuk pertama Kesawan. Bersama adiknya, Ahmad, Masannah membuka kawasan yang kini dikenal sebagai Jalan Jenderal A. Yani, yang dulunya lebih dikenal dengan sebutan Kampung Kesawan. Sementara itu, Tok Wan Haria berpendapat bahwa kawasan yang sekarang disebut Jalan Jenderal A. Yani dahulunya merupakan sebuah kampung tempat persinggahan para pedagang yang datang untuk berdagang dan menyabung ayam. Menurutnya, nama daerah datar ini mengandung arti tempat yang lengang, sunyi, dan juga "rawan" bagi suku Karo (Sinar, 1991).

Pada masa dahulu, orang-orang Karo yang membawa hasil hutan mereka untuk dijual ke Penang (Malaysia) harus melewati dataran Sungai Deli. Di kawasan ini, tepatnya di sekitar belakang Balai Kota, menurut Tok Wan Haria, pernah dikenal sebagai tempat beroperasinya para perampok. Saat mereka akan menukar hasil hutan dengan garam di daerah tepi sungai itu, mereka harus melalui daerah yang rawan tersebut. "Dulu, sungai ini sangat besar sehingga bisa dilalui kapal. Kesawan hanya merupakan titik pertemuan perdagangan dari tanah Karo melalui sungai. Di belakang balai kota itulah banyak terjadi perampokan karena daerahnya yang lengang dan sepi." Seiring perkembangan Kota Medan, kawasan ini mulai ramai. Tempat ini menjadi pusat perlintasan penduduk yang berasal dari Serdang menuju

Sunggal, dari Percut menuju Hampan Perak, bahkan dari Labuhan ke Deli Tua. Kampung Kesawahen inilah yang kemudian menjadi Kesawan. Kesawan memiliki peran penting dalam sejarah Kota Medan, dulunya merupakan cikal bakal pemusatan wilayah Kota Medan dan sering disebut dengan istilah "Medan-Deli." Pada masanya, Kesawan ini adalah kawasan Eropa dan menjadi sebuah kampung persinggahan para pedagang yang datang untuk berdagang dan menyabung ayam; semua kegiatan dilakukan di sana. Kawasan ini menjadi pusat perlintasan penduduk yang berasal dari berbagai daerah (Barus et al., 2021).

Seiring berjalannya waktu, permukiman etnis Tionghoa mulai mendominasi wilayah tersebut dan mengubahnya menjadi kawasan bisnis yang berkembang pesat. Pada tahun 1918, wilayah ini diserahkan oleh Kesultanan Deli kepada Pemerintah Hindia Belanda. Setelah diambil alih oleh pemerintah kolonial, kawasan ini disulap menjadi pusat pemerintahan, tempat berdirinya kantor-kantor perkebunan, bank, perusahaan asing, dan restoran, hingga akhirnya Kesawan menjadi pusat kota. Hingga kini, banyak bangunan tua peninggalan zaman kolonial di kawasan ini masih berdiri, menjadi saksi bisu perjalanan sejarahnya yang panjang.



Gambar 2. Kesawan di Masa Kolonial– Tempat Berniaga
(Sumber: Delpher)

Polonia (Wilayah Kedatukan Sukapiring)

Polonia adalah sebuah kawasan yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kota Medan dan dunia dirgantara di Sumatera Utara. Seiring dengan perkembangan kota, Polonia menjadi saksi bisu atas berbagai tantangan dan kemajuan dalam penerbangan, meskipun lokasinya yang padat penduduk dan kontur perbukitan Bukit Barisan menjadikannya kurang ideal sebagai area penerbangan. Kepadatan penduduk dan kondisi geografis yang bergelombang sebenarnya menandakan ketidaklayakan Polonia sebagai bandara. Namun, selama 139 tahun, Polonia tetap identik dengan dunia penerbangan di Sumatera Utara, sebuah warisan yang patut diapresiasi, terutama setelah bandara utama di Medan dipindahkan ke *Kuala Namu International Airport* (KNIA) pada 25 Juli 2013. Meskipun masa kejayaan Polonia sebagai bandara telah berakhir, kenangan akan kebisingan pesawat dan sejarah panjang kawasan ini akan terus dikenang oleh penduduk setempat (Barus et al., 2021).

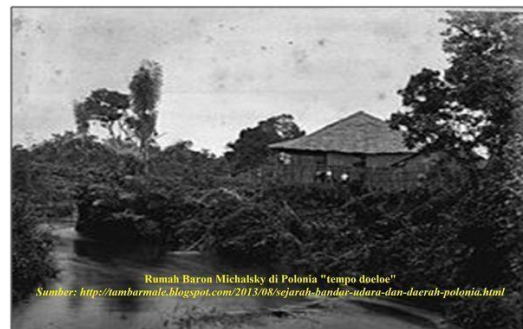
Sejarah Polonia dimulai pada tahun 1872, ketika wilayah tersebut dimiliki oleh seorang warga Polandia bernama Michalsky. Pada awalnya, area ini merupakan lahan rawa yang tak bertuan, yang kemudian dibeli dan diolah oleh Michalsky menjadi perkebunan tembakau yang luas dan produktif. Karena wilayah ini belum memiliki nama resmi, Michalsky menamakannya "Polonia," yang merupakan bahasa Latin untuk Polandia, dengan harapan bahwa daerah ini bisa dikembangkan sebagai pemukiman bagi warga Polandia yang bekerja di Sumatera Timur. Namun, pada tahun 1879, Michalsky menjual perkebunannya kepada konsesi *Nederlansche Vereeniging Deli Matschappij* (Deli Mij), yang berujung

pada pengusuran warga Polandia dari daerah Polonia. Pengusuran ini tidak berlangsung lama, karena tanah tersebut kemudian dikonsesikan kepada pemerintah Kolonial Belanda untuk dijadikan area perumahan bagi para ekspatriat asing (Husny, 1978).

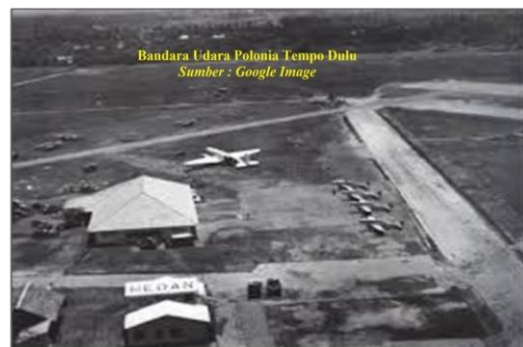
Pengembangan kawasan Polonia didorong oleh adanya beberapa bangunan bergaya barok milik Baron Michalsky dan beberapa karyawannya. Setelah Deli Mij mengambil alih kepemilikan, perusahaan tersebut berencana memberikan sebagian lahannya untuk dijadikan landasan pacu pesawat terbang. Rencana ini muncul setelah mendengar kabar tentang penerbang Belanda, Van Der Hoop, yang akan menerbangkan pesawat jenis Fokker dari Eropa ke wilayah Hindia Belanda. Namun, setelah tahun 1879, berita tentang penerbangan Van Der Hoop dan pesawatnya tidak lagi terdengar. Pada tahun 1924, kabar tentang kedatangan pesawat Fokker kembali berhembus. Kabar ini diterima dengan mendadak dan waktu yang terbatas, sehingga persiapan untuk menampung pesawat sangat minim. Meski demikian, Van Der Hoop dan dua rekannya, Van Poelman dan Van Der Broeke, berhasil mendaratkan pesawat mereka di Polonia. Kedatangan mereka disambut meriah oleh warga Medan pada saat itu, termasuk oleh Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah, pemimpin Kesultanan Serdang, yang menjadi orang Medan pertama yang menaiki pesawat tersebut dan melihat langsung Kota Medan dari udara (Meuraxa, 1973).

Pada saat itu, landasan pacu di Polonia hanya memiliki panjang 2,9 kilometer. Oleh karena itu, Asisten Residen Sumatera Hindia Belanda di Batavia mendesak percepatan pembangunan Bandara Polonia agar lebih serius dalam melayani penerbangan. Pada tahun 1928, lapangan

terbang Polonia resmi dibuka untuk enam unit pesawat milik Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij (KNILM), anak perusahaan Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM). Pada waktu itu, landasan pacu masih terbuat dari tanah yang dikeraskan. Baru pada tahun 1930, perusahaan Belanda tersebut membuka penerbangan reguler ke Medan. Pada tahun 1936, untuk pertama kalinya, pemerintah Hindia Belanda melakukan perbaikan bandara, dengan memperpanjang landasan pacu agar dapat menampung pendaratan pesawat jenis Airbus dan Boeing (Meuraxa, 1973).



Gambar 3. Rumah Michalsky di Polonia
(Sumber: Wan Chaidir Barus)



Gambar 4. Bandara Polonia
Kedua gambar di atas diambil dari buku
Raja-Raja di Sumatera Timur
(Sumber: Wan Chaidir Barus)

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan Kesawan, Polonia, dan Kota Maksom di Kota Medan memiliki peran yang signifikan dalam sejarah sosial, ekonomi, dan politik di Sumatera Timur, khususnya dalam konteks Kedatukan Urung Suka Piring. Kesawan, yang awalnya merupakan pusat perdagangan tradisional, mengalami transformasi menjadi pusat bisnis modern, meskipun banyak bangunan bersejarahnya kini dalam kondisi memprihatinkan. Kawasan ini tidak hanya mencerminkan perkembangan kota, tetapi juga menunjukkan bagaimana pengaruh kolonial Belanda membentuk struktur sosial dan ekonomi setempat. Polonia, yang awalnya merupakan lahan rawa tak bertuan, berkembang menjadi kawasan penting dalam sejarah dirgantara di Sumatera Utara. Selama lebih dari satu abad, Polonia menjadi pusat penerbangan sebelum akhirnya bandara utama dipindahkan ke Kuala Namu International Airport. Sejarah Polonia mencerminkan bagaimana kawasan ini beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi, serta pentingnya kawasan ini dalam perkembangan infrastruktur transportasi udara di Medan.

Kota Maksom, yang dikenal sebagai kawasan pemukiman bangsawan dan tempat tinggal ulama besar, memperlihatkan bagaimana struktur sosial di kawasan ini dipengaruhi oleh kebijakan kolonial dan migrasi. Perubahan demografis dan sosial yang terjadi di Kota Maksom mencerminkan dinamika interaksi antara kekuasaan lokal dan kolonial, serta bagaimana tradisi dan struktur sosial lokal beradaptasi dengan perubahan zaman. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa sejarah Kesawan, Polonia, dan Kota Maksom tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih luas,

yaitu dinamika politik, ekonomi, dan sosial di Sumatera Timur selama periode 1823-1946. Ketiga kawasan ini tidak hanya penting dalam sejarah lokal Medan, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana entitas politik tradisional seperti Kedatukan Urung Suka Piring beradaptasi, bertahan, dan bertransformasi di tengah pengaruh kolonialisme dan perubahan sosial yang signifikan. Penelitian ini berhasil memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang peran dan signifikansi kawasan-kawasan ini dalam konteks sejarah Sumatera Timur, serta kontribusi mereka terhadap pembentukan identitas kota Medan dan wilayah sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Asari, H., & Zuhriah, Z. (2021). Sejarah Kedatukan Urung Sepuluh Dua Kuta Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, 1823-1946. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 1(3), 74–79.
<https://doi.org/10.34007/warisan.v1i3.568>
- Andaya, L. Y. (2008). *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*. University of Hawaii Press. Honolulu
- Anderson, J. (1823). *Mission to the East Coast of Sumatra 1823-1971*. Oxford University Press. Singapura
- Armani, H., Yulisa, D., & Okwita, A. (2020). Konflik Agraria Pada Masa Revolusi Sosial Di Sumatera Timur 1946-1955. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 5(2), 99–114. Retrieved from
<https://journal.unrika.ac.id/index.php/journalhistoria/article/view/3486/pdf>

- Barus, W. C., Kaban, A., Kaban, Y. Y., & Sentosa, S. (2021). *Raja-Raja Sumatera Timur (Kumpulan Tulisan)*. Purba Press. Medan
- Basarshah, T. L. S. (2006). *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*. Yayasan Kesultana Serdang. Medan
- Burke, P. (2003). *Sejarah dan Teori Sosial*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Yayasan Penerbit UI. Jakarta
- Husny, T. H. . L. (1978). *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950*. Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah. Jakarta
- Irwanto, Dedi, Alian, & Sair. (2014). *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Eja Publisher. Yogyakarta
- Kartodirjo, S. (1987). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, dari Emporium Sampai Imperium*. Gramedia. Jakarta
- Kuntowijoyo, K. (2003). *Metodologi Sejarah*. PT.Tiara Wacana. Yogyakarta
- Meuraxa, D. (1973). *Sejarah Kebudayaan Suku-Suku Melayu di Sumatera Utara*. Sasterawan. Medan
- Pelly, U., & Ratna. (2022). *Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli, dan Serdang*. Perdana Publishing. Medan
- Pelzer, K. J., Rumbo, J. (1985). *Toeang Keboen dan Petani Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur tahun 1863-1947*. Sinar harapan. Jakarta
- Perret, D. (2012). *Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta
- Reid, A. (2005). *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra*. Singapore University Press. Singapore
- Sinar, L. (2006). *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*. Yayasan Kesultana Serdang. Medan
- Sinar, T. L. (1991). *Sejarah Medan Tempo Doeloe*. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Seni Budaya Melayu. Medan
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Ombak. Yogyakarta
- Takari, M., B.S., A. Z., & Dja'far, F. M. (2010). *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*. USU Press. Medan
- Wibowo, A. H., Irwansyah, I., & Faishal, M. (2024). The History of Kedatukan Sunggal Serbanyaman, 1896-1946. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 5(1), 70–81. <https://doi.org/10.34007/warisan.v5i1.2219>